

MASYARAKAT JEJARING (NETWORK SOCIETY) SEBUAH UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI PANCASILA MENUJU PEMILIHAN UMUM 2024

Andreas Doweng Bolo

Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan

Email: andrea@unpar.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu praktik demokrasi. Secara kuantitatif pemilu merupakan sebuah praktik demokrasi paling masif karena melibatkan berbagai perangkat negara dan rakyat dalam jumlah besar. Ada berbagai telaahan tentang pemilu 2024 yang telah bergulir sejak Juni 2022. Tulisan ini merupakan sebuah kajian filosofis dengan memakai metode strukturasi yang dikembangkan Anthony Giddens. Model ini akan membantu merefleksikan realitas pemilu di tengah teknologi informasi yang berkembang pesat. Dunia di satu sisi berada dalam situasi yang oleh Anthony Giddens disebut ontological security tetapi di sisi lain juga berada dalam high-consequence risk. Mencermati pemilu di abad digital yang semakin canggih ini juga menjadi bagian dari refleksi filsafat. Agar pemilu menjadi ajang membangun kedewasaan menuju Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan makmur

Kata kunci: demokrasi pancasila, strukturasi, demagogi, ontological security, high-consequence risk

Pendahuluan

Demokrasi Pancasila merupakan salah satu tema kajian yang perlu mendapat perhatian di berbagai zaman, konteks, dan disiplin ilmiah. Dalam konteks refleksi filosofis perihal Demokrasi Pancasila, Franz Magnis-Suseno dalam pidato pengukuhan guru besar 1994 mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila akan mantap apabila baik kontekstualitas maupun dinamika paham demokrasi diperhatikan (Magnis, 1995). Tulisan ini akan memotret praktik demokrasi di Indonesia terutama di seputar gelaran pemilihan umum (pemilu) 2024 yang sudah bergulir sejak Juni 2022, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pemilu merupakan salah satu ciri negara demokratis di samping berbagai ciri yang lain. Kajian terhadap pemilu sebagai perwujudan demokrasi, memungkinkan ruang diskursus Demokrasi Pancasila menjadi lebih kontekstual dan dinamis. Semuanya ini diharapkan membawa pendewasaan (mündigkeit) bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kedewasaan dalam berdemokrasi tak sekadar dengan adanya “gedung demokrasi”, tidak juga semata hadirnya “lembaga demokrasi” tetapi juga harus sampai pada “praktik demokrasi”. Untuk mengkaji realitas ini penulis akan bersandar pada pemikiran Anthony Giddens tentang strukturasi (Giddens, 1986).

Pemilihan umum merupakan diskursus yang perlu terus dihidupkan karena darinya lahir pemimpin-pemimpin baik yang duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Pemimpin hasil pemilu ini yang akan menentukan arah gerak ruang publik dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Karena para pemimpin hasil pemilu itu akan berperan penting dalam hidup bersama maka segala upaya perlu

disiapkan dengan sangat baik untuk menghasilkan para pemimpin yang kredibel. Kita berharap pemimpin yang akan menjalankan amanat tersebut berjiwa demokratis. Pemimpin yang demokratis ini tak lahir di ruang kosong tetapi lahir dari praktik sosial yang demokratis juga. Konteks praktik sosial demokratis inilah yang akan dikaji dalam refleksi filosofis pada kajian ini.

Salah satu arus besar yang mengempur ruang hidup manusia baik individu, kelompok, dan juga sebagai bangsa adalah kehadiran teknologi informasi. Bila dalam pemilihan umum beberapa tahun lampau, kehadiran informasi masih cukup terbatas, dewasa ini dengan teknologi informasi yang semakin canggih maka informasi baik itu cara pandang, opini membanjari ruang publik dengan intensitas sangat tinggi. Perkembangan internet menjadi salah satu faktor penting mempengaruhi ruang publik dan pada gilirannya mempengaruhi pilihan politik konstituen.

Dinamika dan konteks zaman yang terus berubah ini menantang kajian dan refleksi berbagai ilmu termasuk filsafat agar umat manusia pada umumnya dan warga bangsa Indonesia pada khususnya mempunyai perspektif yang terus tumbuh. Agar pemilu sebagai salah satu proses demokrasi menjadi perwujudan cita-cita kemerdekaan maka semua warga bangsa dari rakyat, penyelenggara pemilu, sampai peserta pemilu perlu dengan meminjam istilah Thomas S. Kuhn, pergeseran paradigma (*paradigm shift*) tentang demokrasi.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu ciri negara demokratis. Pemilu menjadi salah satu batu uji kualitas demokrasi sebuah negara. Mulai dari konsolidasi pra-pemilu, pada saat pemilu, dan sesudah pemilu. Ketiga bidang ini akan memperlihatkan secara demonstratif mutu demokrasi sebuah negara-bangsa (*nation-state*). Indonesia telah menjalani duabelas kali Pemilu sejak kemerdekaan. Pemilihan umum pertama di tahun 1955 di dasarkan pada UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu baru diadakan kembali di era Suharto diawali dengan Pemilu di tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan kualitas demokrasi yang jauh dari ideal (Dhakidae, 2003).

Setelah orde Suharto berakhir pemilu dengan spirit yang lebih demokratis diadakan kembali pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Lima kali pemilu yang telah diselenggarakan di era reformasi ini memberi gambaran tersendiri tentang praktik sosial demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum kembali akan diselenggarakan di tahun 2024. Tulisan ini akan menfokuskan diri pada pemilu sebagai salah satu upaya perwujudan demokrasi terutama praktik sosial menjelang pemilu 2024. Pemilihan umum 2024 sendiri diselenggarakan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Metode

Dewasa ini ketika ilmu pengetahuan semakin terspesialisasi dan canggih memaparkan temuan yang sangat membantu manusia muncul pertanyaan. Masih perlukah filsafat sebagai sebuah kajian ilmiah? Di tengah tuntutan spesialisasi yang tak terelakan filsafat sebagai sebuah kajian ilmiah tetap bisa berperan merefleksikan hal-hal yang karena tuntutan keilmiah masing-masing ilmu pengetahuan seringkali lepas dari pengamatan. Filsafat menjadi lebih fokus pada pertanyaan dasariah tentang realitas pada umumnya. Filsafat merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan bertanggungjawab mencari jawabannya. Immanuel Kant menyatakan bahwa ada tiga pertanyaan filosofis pokok tentang manusia yaitu, pertama, Apa yang harus kuketahui? Kedua, Apa yang harus kulakukan? Dan ketiga, Apa yang boleh kuharapkan? (Magnis, 1995).

Demikian juga untuk perihal demokrasi, tugas filsafat tidak seketat kajian empiris sebagaimana ilmu-ilmu pada umumnya. Tugas filsafat bukan terutama mendeskripsikan fakta tetapi lebih membangun konsep-konsep tentang demokrasi yang membuat demokrasi dipahami lebih mendalam (Haryatmoko, 2003). Bila pertanyaan Kant di atas dirumuskan dalam konteks

kajian ini berarti ada tiga pertanyaan filosofis mendasar yang akan direfleksikan dalam karya ini. Pertama, apa yang harus kuketahui tentang Demokrasi Pancasila? Kedua, apa yang harus kulakukan dalam Demokrasi Pancasila? Ketiga, apa yang boleh kuharapkan dari Demokrasi Pancasila?

Penulis terutama akan memakai kerangka pemikiran Anthony Giddens berkaitan dengan strukturasi. Kerangka pemikiran Giddens menjadi refleksi filosofis tentang praktik demokrasi terutama konteks pemilihan umum yang akan diselenggarakan 2024. Ada ruang sosial demokrasi yang unik yakni kehadiran dunia teknologi informasi dalam hal ini internet. Realitas maya tersebut dewasa ini tak lagi sebagai medium tetapi juga menjadi ruang hidup masyarakat yang disebut masyarakat jejaring (*network society*). Kelompok masyarakat ini menjadi pemain penting dalam jagat pemilu karena jejaring internet ini bisa menghembuskan isu, memainkan opini publik, dan mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan.

Demokrasi Pancasila dalam praktik sosial

Dalam berbagai pembicaraan sering dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis. Secara khusus dinyatakan bahwa demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Pancasila. Pernyataan bahwa Demokrasi Pancasila yang dijalankan bila tidak disertai dengan upaya refleksi maka ia bisa jatuh menjadi ideologis. Upaya refleksi yang dimaksud adalah menerjemahkan gagasan besar itu dalam praktik serta melakukan evaluasi kritis dan terbuka untuk jalannya praktik tersebut. Sebagaimana dikatakan Giddens bahwa refleksi tidak melulu sebagai perihal kesadaran diri (*self-consciousness*) tetapi juga sekaligus memonitor karakter dalam kehidupan sosial (*social life*) sehari-hari (Giddens, 1986). Seperti apa dan bagaimana Demokrasi Pancasila tersebut dalam praktik sosial merupakan sebuah pekerjaan rumah tersendiri. Dalam praktik tersebut, sebenarnya kekuatan dan kelemahan demokrasi termasuk Demokrasi Pancasila dievaluasi karena hanya dengannya demokrasi menjadi realitas yang hidup, menggairahkan, dan membawa kebaikan bersama (*bonum commune*).

Pancasila sebagai *de existentia cogitationis et veritatis* tidak perlu lagi dipersoalkan. Ia lahir dari pemikiran brilian bangsa ini dan yang mengandung kebenaran hakiki mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam merupakan sesuatu yang diterima seluruh bangsa Indonesia. Penerimaan ini dapat dirunut pada pengakuan autentik bahwa Pancasila adalah falsafah, ideologi, dan dasar negara. Ini tidak berarti Pancasila menjadi sebuah pemikiran yang beku dan tak peduli dengan konteks zaman. Pancasila merupakan ideologi yang dinamis dan kontekstual. Pancasila adalah ideologi terbuka.

Akar keterbukaan ini bisa kita runut pada konteks sejarah bangsa Indonesia yang sejak dahulu sudah saling menerima dalam keberagaman. Mpu Tantular (abad-14) dalam Kakawin Sutasoma pupuh 139 bait 5 menyatakan kalimat ini *bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa* (terpecahbelahlah itu, tetapi satu jualah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran) yang kemudian oleh para pendiri negeri ini juga diamini sebagai semboyan hakiki yang menggambarkan realitas keberagaman dalam keharmonisan yang menjadi perjuangan bersama di Nusantara ini. Demikian juga sejarah perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme sampai pada proses kelahiran Pancasila mengindikasikan realitas keterbukaan itu. Pancasila lahir dari generasi tercerahkan yang memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia dan bangsa. Sukarno dengan sangat gamblang menandakan bahwa Pancasila lahir dari dinamika kehidupan rakyat yang sudah dipraktikkan berpuluh-puluh tahun. Sehingga bisa dikatakan Pancasila merupakan sebuah *ideopraxis* (Pranarka, 1995). Setelah 78 tahun kemerdekaan, penerimaan Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara tak lagi dipersoalkan. Yang terus menjadi

perjuangan yakni bagaimana nilai-nilai luhur itu diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Pada titik inilah, refleksi filosofis Pancasila terutama berkaitan dengan perihal pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan demokrasi (Pancasila) menjadi sebuah keniscayaan. Pemilu sebagai salah satu ruang praktik sosial demokrasi Pancasila perlu mendapat perhatian. Karena demokrasi Pancasila sebagai sebuah praktik sosial perlu terus dihidupkan. Tulisan ini tidak menitikberatkan pada perihal persoalan esensialistik tetapi lebih pada eksistensialistik. Untuk kerangka itu penulis akan mendasari diri pada kerangka teori strukturisasi yang digagas oleh Anthony Giddens (1938-) perihal praktik sosial. Bagaimana memahami praktik sosial? Inilah pertanyaan yang akan dijawab dalam rangkaian uraian di bawah ini. Pada bagian ini akan dipaparkan kerangka praktik sosial, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut kemudian dibuat tinjauan atas pemilu sebagai salah satu praktik demokrasi di Indonesia.

Giddens sebagai teoritis ilmu sosial melihat ada persoalan dualisme dalam ilmu sosial. Pada ilmu sosial ada tegangan antara subyektivisme versus obyektivisme, voluntarisme versus determinisme. Masing-masing mempunyai cara pandangnya sendiri-sendiri, subyektivisme dan voluntarisme cenderung memprioritaskan tindakan atau pengalaman individu di atas gejala keseluruhan. Sementara obyektivisme dan determinisme merupakan cara pandang yang memprioritaskan gejala keseluruhan di atas tindakan dan pengalaman individu (Priyono, 2002). Secara sederhana dalam bahasa sehari-hari realitas tersebut dikatakan dengan rumusan sederhana ini, “persoalan berakar pada perihal mentalitas atau struktur”. Misalnya pertanyaan dalam konteks ini, politik uang dalam praktik pemilu di Indonesia itu persoalan mentalitas atau struktur? Bila kita menjawab satu hal maka kita jatuh dalam dualisme dan bila kita menjawab keduanya, maka bagaimana mengaitkan kedua hal tersebut, mentalitas dan struktur. Dengan memakai cara pandang Giddens tentang teori strukturisasi ini perihal ini akan coba direfleksikan. Refleksi ini sekaligus menjadi sebuah cara mengevaluasi praktik demokrasi dengan title Pancasila sesudahnya.

Giddens mengawali pemikirannya dengan melakukan evaluasi kritis atas pemikiran-pemikiran mapan yang telah ada. Ia mempelajari mazhab-mazhab besar seperti fungsionalisme Talcott Parson (1902-1979), interaksionisme Erving Goffman (1922-1982), tentunya juga marxisme, strukturalisme Ferdinand de Saussure (1857-1913) dan Claude Lévi-Strauss (1908-2009), serta postrukturalisme Michel Foucault (1926-1984) dan juga Jacques Deridda (1930-2004). Setelah mempelajari berbagai mazhab besar ini Giddens mengatakan bahwa akar persoalan adalah dualisme. Dan akar persoalan dualisme adalah kerancauan kita dalam melihat kajian ilmu sosial. Bagi Giddens obyek kajian ilmu sosial bukanlah peran sosial (*social role*) sebagaimana pemahaman fungsionalisme Parson, bukan pula kode tersembunyi (*hidden code*) strukturalisme Lévi-Strauss, bukan juga keunikan interaksionisme-simbolis Goffman. Baginya obyek kajian ilmu sosial juga bukan keseluruhan, dan bukan juga bagian, bukan juga struktur atau bukan juga pelaku perorangan namun titik temu antara keduanya. Dan titik temu antara keduanya adalah praktik sosial yang berulang serta terpola lintas waktu dan ruang (Priyono, 2002). Giddens tidak melihat itu sebagai dualisme tetapi sebagai dualitas dimana “tindakan dan struktur saling mengandaikan” (Giddens, 1986). Bila Durkheim melihat struktur sebagai sesuatu yang mengekang (*constraining*), maka struktur dalam pandangan Giddens tidak hanya mengekang tetapi juga memberdayakan (*enabling*) (Giddens, 1986)

Teori ini memandang hubungan antara pelaku dan struktur sebagai relasi dualitas dan bukan dualisme. Relasi dualitas ini terjadi dalam “praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu”. Praktik sosial ini yang sesungguhnya menggambarkan secara gamblang demokrasi sebagai peristiwa di Indonesia. Sebagai praktik sosial, Demokrasi Pancasila perlu

direfleksikan dalam konteks struktur dan pelaku. Dalam pemilihan umum ada struktur berupa norma hukum maupun juga etika yang menjadi skema praktik sosial. Namun mengandaikan dengan perangkat tersebut demokrasi akan berjalan dengan sendirinya merupakan sebuah khayalan. Karena ruang sosial dihuni oleh manusia-manusia dengan berbagai ragam cara pikir, rasa, afiliasi agama, budaya termasuk juga tingkat pendidikan, ekonomi yang beragam.

Demokrasi Pancasila sebagai sebuah falsafah perlu diterjemahkan direfleksikan dalam praktik sosial. Salah satu medan praktik sosial Demokrasi Pancasila sebagaimana disebutkan di atas adalah pemilihan umum (pemilu). Dinamika pemilihan umum dewasa ini terjadi tidak hanya di ruang fisik tetapi bahkan lebih-lebih wilayah non-fisik. Karena sesungguhnya tindakan memilih itu sendiri lahir dari sebuah ruang non fisik karena ia berkaitan dengan cara pandang dan pemikiran. Memang hasil pemilihan bisa direkap dan ditabulasi untuk menentukan pemenang pemilih tetapi dasar dibalik pilihan itu tetap menyimpan berbagai argumen yang tak seluruhnya terurai sempurna. Situasi ini semakin menantang dengan lahirnya teknologi internet dimana ruang pemikiran yang abstrak itu hadir di dunia maya. Hadirnya dunia maya ini memperluas ruang fisik dan juga membuat pemikiran, cara pandang, ideologi mengalir dengan deras. Situasi ini mengubah cara kita melihat ruang politik dewasa ini. Ruang maya dewasa ini mempengaruhi ruang politik beriring dengan menjamurnya pengguna internet demikian juga pertarungan di ruang fisik akan semakin bergema bila di bawa ke ruang maya.

Sehingga ketika pemilihan umum direfleksikan sebagai bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia maka dunia maya perlu mendapat tempat. Karena pemilihan umum merupakan pertarungan juga di wilayah tak kasat mata yakni kenyataan maya (*virtual reality*). Pencipta istilah ini Jaron Lanier dalam wawancara mengatakan bahwa ia tidak menyukai istilah bodoh ini namun istilah tersebut menarik perhatian (Supeli, 2010). Maka pada bagian berikut ini akan dipaparkan perkembangan dunia digital terutama perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Pertaruhan dewasa ini berbeda dengan beberapa dasawarsa lalu. Ruang politik dewasa ini juga ada di ruang virtual tersebut. Sehingga dinamika ruang ini pun perlu dicermati secara mendalam dalam kaitan dengan refleksi pemilihan umum di Indonesia sebagai upaya menerjemahkan semangat Demokrasi Pancasila.

Network society dalam dinamika demokrasi di Indonesia

Bagaimana menempatkan teknologi informasi di abad yang bergerak super cepat ini dengan jangkauan luas tepermanai serta tak dibatasi ruang dan waktu tradisional. Pada bagian ini akan diuraikan dua bagian, bagian pertama seputar perkembangan logika jaringan (*networking logic*) yang dikembangkan Teknologi Informasi (TI) di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Kedua, penulis akan melakukan refleksi perihal pengaruh logika jaringan bagi dinamika pemilu di Indonesia terutama pemilu 2024.

Pertama, perkembangan logika jaringan menguatkan orang-orang yang berada dalamnya dan membawa dampak perekonomian yang cukup signifikan di era global ini (Castells, 2010). Peran internet dalam membentuk masyarakat yang disebut sebagai masyarakat jejaring (*network society*) (Dijk & Hacker, 2018). Masyarakat jejaring di realitas maya ini di satu sisi menghadirkan yang aktual ke dunia maya (online) tetapi sekaligus menjadikan dunia maya sebagai realitas aktual. Dunia digital membuat manusia perlu berpikir luas sebelum mengambil langkah-langkah lebih lanjut memberi tanggapan, merumuskan, dan bertindak. Itu berarti realitas teknologi informasi yang super cepat ini tetap membutuhkan nalar logis yang terpelihara baik untuk mengontrol rasa yang bisa hanyut dalam lautan informasi tersebut. Persis di sini kunci penting penguatan demokrasi dalam hilir mudik dan aliran deras informasi. Perkembangan internet yang merambah cepat juga membawa persoalan tersendiri.

Pengaruh realitas teknologi bagi dinamika kekuasaan di Indonesia bisa dirunut pada kejatuhan orde Suharto 1998. Intensifikasi komunikasi antara para aktivis 1998 melalui teknologi informasi yang kala itu mulai hadir di Indonesia berperan penting dalam menjatuhkan rezim yang tidak demokratis tersebut. Dunia teknologi komunikasi yang kala itu baru tumbuh berperan dalam menjatuhkan Suharto dari kekuasaannya yang telah tiga dasawarsa berkuasa (Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2013). Internet kala itu baru mulai dipergunakan para aktivis secara sangat terbatas untuk mengkonsolidasi perjuangan. Tetapi ia menjadi sarana efektif menghimpun dan menyampaikan ide perlawanan dalam senyap terhadap rezim yang menamakan diri orde baru.

Rezim tua ini yang selama 32 tahun berkuasa selalu percaya diri bahwa segala hal bisa dikontrol tanpa menyadari bahwa aras keyakinan tersebut sudah sangat rapuh. Rezim kekuasaan saat itu tak menyadari bahwa dunia telah berubah demikian juga dengan Indonesia. Orde Suharto yang selama ini dengan sangat ketat mengawasi berita atau media di bawah kontrol Kementerian Penerangan tak menyadari ada perkembangan teknologi yang merambat masuk dan menggoyahkan kekuasaan. Perkembangan mutakhir itu adalah Teknologi Informasi (TI) dan terutama logika jaringan yang melahirkan internet (Castell, 2010). Kehadiran internet di Indonesia membuka tabir-tabir kekuasaan kediktatoran orde Suharto. Informasi yang lebih terbuka dan dipercaya menyatukan gerakan rakyat dan mahasiswa yang pada gilirannya mengakhiri kekuasaan Suharto (Merlyna Lim, 2014). Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi berperan penting dalam dinamika demokrasi di Indonesia.

Teknologi informasi menjadi kekuatan penting di ruang publik di era global ini dengan tingkat pemakaian teknologi informasi yang semakin massif. Dalam skala dunia pergerakan pengguna internet melaju dengan sangat cepat. Laporan *We Are Social* dan *Hootsuite* sebagaimana dirilis *katadata* menunjukkan pergerakan pengguna internet yang sangat cepat. Di tahun 1994 tercatat secara global 20,1 juta pengguna internet dan saat ini setelah lebih kurang 30 tahun menjadi 5,16 miliar penduduk dunia menggunakan internet atau setara 64,4% dari populasi penduduk dunia 8,01 miliar. Di Indonesia sendiri masih dari laporan *We Are Social* tercatat 39,6 juta pengguna internet pada tahun 2012. Angka ini meningkat tajam lebih kurang lebih 10 tahun kemudian menjadi 212,9 juta penduduk Indonesia menggunakan internet, setara dengan 77 persen penduduk Indonesia.

Dengan populasi pengguna internet yang sangat banyak sebaran informasi menjadi begitu mudah dan cepat. Sekali klik informasi tersebut meluncur ke ruang digital dan informasi tersebut melahirkan komentar bertubi yang terus melahirkan komentar kembali. Semua ini berjalan bisa dengan situasi anonim atau sekurang-kurangnya orang tidak saling mengenal. Komunikasi di dunia digital dewasa ini bukan lagi antar manusia yang berkomunikasi melainkan sebagaimana dikatakan Niklas Luhmann, “komunikasi berkomunikasi dengan komunikasi” (Hardiman, 2021).

Kedua, pengaruh logika jaringan menjelang pemilu 2024. Dengan pengguna internet yang begitu banyak maka informasi termasuk informasi seputar pemilu mengalir deras di jagat maya. Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 telah terdeteksi 1.321 konten hoaks seputar pemilu 2024 dan sudah dilakukan tindakan penutupan konten-konten tersebut. Inilah resiko demokrasi ketika kran keterbukaan dilepaskan terselip di dalamnya risiko yang harus dihadapi manusia abad ini seputar praktik demokrasi tersebut.

Bila kita mencermati pengguna internet sebagaimana dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 15 Mei 2023 tingkat penetrasi internet di tahun 2023 ini naik menjadi 78,19 persen dari sebelumnya 77,02 persen (2022). Demikian juga dengan jumlah penduduk terkoneksi internet 215.626.156 dari jumlah penduduk Indonesia 275.773.901 jiwa. Ini

mengindikasikan penetrasi yang sangat tinggi di bidang ini. Laporan ini juga menunjukkan situs yang dikunjungi pengguna internet yaitu pertama kesehatan 36,96 persen, disusul olahraga 34,34 persen, kemudian infoteimment/gosip 32,32 persen serta politik, sosial, hukum, dan HAM 24,73 persen. Ini mengindikasikan bahwa perhatian pada diri atau kesehatan diri cukup tinggi namun juga perihal gosip tetap mendapat porsi tinggi. Sebenarnya survei ini juga menunjukkan bahwa perhatian terhadap ruang publik tergolong cukup tinggi dari publik Indonesia 24, 73 persen. Sementara itu bila distribusi tersebut dilihat dalam kategori gender maka laki-laki mengakses perihal politik, sosial, hukum, dan HAM pada urutan kedua 33,94 persen sedangkan pada urutan pertama yang paling banyak diakses kaum pria adalah situs olahraga 53,42persen. Sedangkan perempuan paling banyak mengakses infoteimment/gosip paling banyak yakni 49,48 persen dan nomor dua kesehatan 44,00 persen. Informasi ini mengindikasikan situasi kini dimana perhatian terhadap perihal kepublikan tergolong cukup tinggi.

Bila dicermati media sosial seperti yakni *youtube* mengalami kenaikan pengguna menjadi 65,41 persen, disusul *facebook* 60,24 persen, kemudian *instagram* 30,51 persen. Waktu yang dihabiskan untuk mengakses media sosial yaitu 1-2 jam sebesar 46,16 persen. Sedangkan media *chat* yang sering digunakan yaitu *whatsApp* mengalami kenaikan menjadi 98,63 persen disusul diperingkat kedua walau mengalami penurunan yaitu *facebook messenger* diangka 46,00 persen. Data ini memberi gambaran betapa teknologi informasi mengambil peran penting dalam kehidupan manusia dewasa ini. Media sosial menjadi cara memperoleh informasi paling utama bagi manusia dewasa ini tetapi sekaligus media memproduksi dan mereproduksi informasi dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi ini juga membawa berbagai macam kemudahan bagi manusia. Misalnya, perihal finansial orang mengakses home banking, untuk produk dan berbagai layanan melalui *virtual stores* dan *e-commerce* sampai pada perihal sosial politik dunia digital telah menyiapkan juga *website* dan *social networks*. Tidak hanya itu untuk berbagai relasi profesional juga pribadi ada berbagai perangkat digital yang siap teknologi informasi termasuk perihal hiburan pun dunia digital telah menyiapkan berbagai perangkat komplit seperti, *streaming, YouTube, Netflix* (Rascão, 2023)

Data yang ada mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi informasi dewasa ini menjadi sebuah keniscayaan. Bila sepuluh atau duapuluh tahun lalu masyarakat lebih banyak pasif di ruang maya dengan kehadiran internet masyarakat tidak sekadar menjadi tujuan berita tetapi bisa membuat berita. Masyarakat demokratis dengan salah satu ciri partisipasi dalam ruang publik cukup tampak di realitas maya. Berbagai fenomena di negeri ini baik perihal hukum, ekonomi, sosial, politik termasuk juga infrastruktur segera ditangani setelah menjadi perhatian publik karena viral di media sosial.

Meminjam istilah Anthony Giddens kemajuan teknologi ini bisa dikatakan sebagai *radicalized modernity* ketimbang *postmodernity* (Giddens, 1990). Karena istilah *postmodernity* dipandang melenyapkan subyek dianggap berlebihan dan mengabaikan aspek refleksif manusia dalam tindakan sehari-hari. Aspek ini bagi Giddens tampak dalam dinamika kemajuan teknologi yang begitu cepat dan canggih. Kemajuan teknologi ini sangat membantu manusia mengatasi berbagai persoalan kehidupannya yang tak pernah dialami oleh generasi-generasi manusia sebelumnya. Situasi kenyamanan ini dengan meminjam Giddens bisa kita sebutkan sebagai *ontological security* namun ia sekaligus membawa manusia pada *high-consequence risk*. Situasi ini dalam praktik sosial keseharian juga dilihat dalam konteks pemilihan umum termasuk di Indonesia. Sebagaimana dilukiskan di atas, kemajuan dunia teknologi informasi membawa *ontological security* bagi manusia. Ada kemudahan yang tak pernah dialami umat manusia sebelumnya sebagaimana situasi kita dewasa ini. Bila manusia adalah makhluk berbahasa berkembang dari gosip satu dengan lain untuk memperkuat ikatan sosial dalam menghadapi ancaman dari luar maka situasi itu sungguh semakin luas dewasa ini (Harari, 2011). Bahasa tak

lagi hanya dipakai dalam pertemuan langsung tetapi juga berlangsung di di dunia maya dengan kecepatan yang tinggi. Tetapi teknologi sebagaimana teknologi pada umumnya membawa resiko, demikian juga teknologi informasi yang berkembang pesat membawa resiko tersendiri bagi umat manusia. Teknologi pada umumnya yang dalam bahasa Giddens menghasilkan *manufactured uncertainties* juga dialami dalam perkembangan teknologi informasi yang dasyat. Perkembangan teknologi informasi juga membawa pada *manufactured uncertainties* membawa konsekuensi pada risiko yang juga semakin tinggi pula. Giddens menyebut situasi ini sebagai *high-consequence risk*. Pertanyaan kemudian, dalam konteks pemilu di Indonesia apa *ontological securities* yang melingkupi dan apa *high-consequences risk* yang dihadapi? Pada bagian di bawah ini kedua hal ini akan dibaca dalam konteks pemilu 2024 yang sudah dimulai dengan berbagai tahapan sampai saat ini.

Pemilu 2024 antara *ontological security* dan *high-consequence risk*

Sebagaimana khas telaahan Giddens dengan metode dualitas sebagaimana diuraikan di atas bagian ini pun akan mengkaji pemilu 2024 dengan kategori tersebut. Indonesia secara politik kenegaraan telah menyatakan bahwa para penyelenggara negara ini dipilih oleh rakyat. Filosofi ini kemudian terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 2 ayat 1 diatur perihal Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Demikian juga pada pasal 6A mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada tingkat daerah provinsi, kota/kabupaten juga diatur mekanisme pemilihan baik itu pemimpin eksekutif maupun legislatif. Pada Bab VIIB tentang Pemilihan Umum yakni pasal 22E terdapat enam ketentuan mengenai pemilihan umum. Pada ayat 1 menandakan spirit demokrasi yang berisi etika politik pada ayat 2-5 mengatur tentang teknis pemilihan dan pada ayat 6 bicara tentang norma pengatur lebih lanjut untuk perihal pemilihan umum.

Bila dicermati pemilihan umum telah memiliki skemata/struktur yang rapi dalam apa yang secara ringkas bisa disebut sebagai konstitusi negara Indonesia, mulai dari falsafah sampai pada peraturan teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Ini merupakan kerangka legitimasi yang berisi norma dan didalamnya ada perihal dominasi yang tentu berkaitan dengan kekuasaan. Dan dibalik dominasi tersebut ada struktur penanda, signifikasi yang beroperasi. Ketiga hal ini oleh Giddens disebut sebagai signifikasi, dominasi, dan legitimasi.

Pemilihan umum dalam kerangka berpikir Giddens bisa ditempatkan sebagai struktur penanda (*signification*) bahwa sebuah negara atau kekuasaan negara dikelola secara demokratis. Pada bagian ini ada bingkai interpretasi tentang pemilihan umum yang demokratis. Bila ada interpretasi berarti juga ada jejaring komunikasi. Agar praktik pemilihan umum sungguh merupakan perwujudan cita-cita demokrasi maka detail-detail pengaturan menjadi suatu *conditio sine qua non*. Dalam detail pengaturan tersebut struktur-struktur dominasi dikelola agar operasionalisasi praktik sosial tertata baik. Dalam bahasa para strukturalis pengelolaan dominasi ini bisa disebut sebagai *langue*.

Hubungan pada tataran struktur tak mungkin berjalan tanpa pelaku konkret dan itu berelasi dengan kekuasaan yang beroperasi dalam praktik sosial yang dalam bahasa kaum strukturalis disebut *parole*. Dominasi berkaitan erat dengan lembaga-lembaga atau organ-organ yang terlibat didalam penyelenggaraan pemilu sedangkan kekuasaan berkaitan dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bila kita membaca dalam konteks dominasi maka di dalamnya terlihat jelas ada penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu, ada rakyat atau kekuatan *civil society*, ada peran media. Semuanya ini berjalan berdasarkan wewenang yang dimiliki baik ditataran *langue* maupun ditataran *parole*. Sebagaimana juga dikatakan tak mungkin ada struktur

tanpa pelaku, begitu pula tidak ada struktur dominasi tanpa relasi kekuasaan yang berlangsung di antara pelaku yang konkret (Herry-Priyono, 2002; Giddens, 1986).

Demokrasi secara dasariah dipahami sebagai kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam kerangka berpikir Giddens teori bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat perlu direfleksikan dalam tiga skemata pemikiran yaitu signifikasi (*signification*), dominasi (*domination*), dan legitimasi (*legitimation*) (Giddens, 1986). Pada tataran struktur sosial ini perihal demokrasi dikelola secara rasional dalam berbagai diskursus ilmiah yang mengindikasikan garis otoritas dan legitimasi demokrasi. Namun, struktur demokrasi ini tidak lahir di ruang kosong ia lahir dari praktik sosial sehari-hari bisa berupa rapat di jajaran eksekutif atau perdebatan sengit di parlemen (legislatif) atau juga keputusan yang diambil oleh pengadilan (yudikatif). Dalam konteks demokrasi praktik sosial itu juga bisa terjadi dalam peraturan yang mengatur detail pemilu yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum atau bisa juga berupa hasil survei tertentu yang dipublikasikan oleh media atau instruksi partai termasuk juga makan malam bersama anggota partai. Praktik sosial keseharian itu juga bisa hadir dalam aksi protes atau dukungan masyarakat terhadap kebijakan tertentu baik itu dengan demonstrasi ataupun dengan pernyataan di media massa atau media sosial. Praktik sosial demokrasi dalam konteks pemilu 2024 muncul dalam pengumuman calon presiden tertentu dari partai tertentu yang kemudian disambut deklarasi dukungan dari berbagai komponen dan lapisan masyarakat. Di dalam praktik sosial ini demokrasi sungguh bergulir dengan konkret dimana kekuasaan sebagai *langue* dan *parole* beroperasi dengan konkret. Struktur sosial dan praktik sosial itu bisa berjalan karena ada sistem sosial berupa lembaga-lembaga yang merupakan perwujudan dari demokrasi itu sendiri. Sebuah negara demokratis terwujud dalam sistem atau lembaga demokratis baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif termasuk juga sistem lain di luar itu seperti lembaga pemilihan umum yang independen, sistem pers yang bebas, *civil society* yang kuat. Sebagaimana dikatakan Jimly Asshiddiqie dalam ketatanegaraan pun struktur lembaga-lembaga demokratis mengalami perluasan tak lagi hanya sekadar eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Asshiddiqie, 2006)

Pertaruhan kualitas demokrasi di Indonesia itu pada tataran ini merupakan praktik sosial yang merupakan medan yang kaya makna dengan berbagai macam tantangan bahkan juga ancaman. Pada konteks praktik sosial itulah kita menemukan berbagai ancaman dalam demokrasi baik dalam bentuk represi atas nama kekuasaan ekonomi, pengaruh politik, dominasi budaya, termasuk juga penindasan atas nama agama, etnis. Di dalam praktik sosial yang serba terbuka di dunia digital ini yang pada satu sisi memberi semacam kenyamanan ontologis dalam mengekspresikan diri tetapi juga berdampak pada konsekuensi sosial besar di ruang publik bila orientasi ke diri atau kelompok begitu dominan sehingga tidak mampu memberi pertimbangan lebih luas bagi ruang publik. Dalam era masyarakat jejaring ini satu hal yang mengitari ruang publik kita yaitu percepatan berita. Informasi begitu cepat dan tak hanya itu semua orang bisa memproduksi informasi tersebut. Sesuatu yang belum ada beberapa tahun sebelumnya.

Salah satu yang menjadi warna pemilu yakni berbagai macam opini di ruang publik. Karena dalam alam demokrasi ruang publik itu sungguh menjadi ruang terbuka. Ia bisa diisi dengan berbagai macam opini, teori, dan pandangan. Ia juga bisa diisi dengan berbagai macam jenis kampanye dari kampanye negative (*negative campaign*) dengan data sah dan argumentasi logis yang memang menjadi sebuah hal yang sangat wajar dalam berdemokrasi. Namun ruang publik juga bisa dijejali dengan kampanye hitam (*black campaign*) yang dalam konteks ini akan disebut sebagai politik demagogi. Politik demagogi ini bagai bola salju yang kian membesar dan menghancurkan dengan serpihan-serpihan hoaks (*hoax*) yang meluncur cepat tak terkendali di abad digital ini. Tulisan ini tidak ingin membahas hal itu secara spesifik tetapi ingin melanjutkan ke pertanyaan mendasar. Mengapa muncul model kampanye berbasis hoaks yang menjadi lahan subur politik demagogi? Bila direfleksikan secara saksama, ia lahir dari suatu naluri purba dalam

diri manusia yakni kebencian. Politik demagogi yang miskin gagasan dan ingin menguasai ruang publik dengan meminjamkan suara kebencian ini kepada rakyat (Haryatmoko, 2003; Sindhunata, 2007).

Kebencian menjadi *high-consequence risk* bagi gerak demokrasi pada umumnya dan pemilihan umum pada khususnya. Hal ini karena dibalik *ontological security* berupa teknologi informasi yang begitu canggih ancaman nyata politik adalah kebencian. Kebencian menjadi penyebab utama kekerasan massal atas nama agama, etnis, suku. Orang boleh mengatakan sebab utama adalah kesenjangan ekonomi atau sistem politik yang represif atau oligarkis dan koruptif. Tetapi sangat naif bila mengabaikan aspek kebencian. Harus diakui dengan jujur bahwa kebencian itu real ada dan dirasakan (Haryatmoko, 2006). Di abad ini dengan teknologi yang memungkinkan semua orang bisa memproduksi informasi membuat sebaran informasi yang begitu cepat termasuk didalamnya bila isi informasi itu mengandung narasi-narasi kebencian. Kebencian itu bisa berasal dari siapa saja baik diucapkan secara sengaja maupun tidak sengaja yang kemudian mereproduksi diri menjadi gumpalan-gumpalan kebencian yang membesar. Kebencian bisa lahir dari ucapan atau tulisan (*chat*) atau juga klip video di *tiktok* atau *youtube* bisa oleh elit partai, tokoh agama, politisi, artis, selebgram atau juga rakyat kebanyakan. Ia bisa menggumpal dalam kebencian yang semakin kuat bila penerima pesan atau publik tak cukup kritis membaca pesan tersebut.

Muncul pertanyaan bagaimana kebencian itu lahir? Pada titik ini dengan memakai refleksi René Girard (1923-2015) tentang mimesis. Girard, filsuf Prancis yang menjadikan refleksi filsafat sebagai sebuah lorong metanoia mengatakan, bukan seks tetapi kemarahan yang merupakan kekuatan tersembunyi yang beroperasi pada diri manusia (Haryatmoko, 2003). Girard mengatakan bahwa kemarahan merupakan struktur dasar hasrat manusia. Struktur ini lahir karena manusia ingin mengafirmasi keberadaannya. Dan afirmasi diri ini membutuhkan kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain memunculkan hasrat mimetis (meniru) diriku atau kelompokku. Mimetis yang tidak dikelola baik akan menjadi pasar kebencian yang terus mereproduksi diri di ruang publik (Girard, 1986). Sanggupkah rakyat Indonesia mengatasi situasi ini? Optimisme bahwa bangsa Indonesia sanggup melampaui humus purba kemarahan dan kebencian sebagai akar politik demagogi itu tentu sesuatu yang mendasar. Hal ini karena setelah reformasi, bangunan demokrasi Indonesia semakin tertata dimana ruang fisik demokrasi hadir, ditambah hukum lahir dari iklim yang lebih demokratis. Namun, situasi ini tidak dengan sendiri berarti pekerjaan selesai karena ada satu bagian yang panjang tetapi sekaligus melelahkan dan menentukan iklim demokrasi yakni proses habituasi demokrasi. Proses habituasi demokrasi yakni pembiasaan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur demokrasi tak tergantikan oleh sanksi hukum, tidak juga oleh paksaan, tidak oleh insentif uang (Bourdieu, 1992). Pemilu harus ditempatkan dalam proses habituasi demokrasi ini, ia memang tidak sempurna tetapi ia (pemilu) menjadi tempat habituasi demokrasi tumbuh subur dan mempunyai masa depan di tengah situasi dunia yang *high-consequence risk*.

Kesimpulan dan Saran

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu praktik sosial demokrasi Pancasila. Kualitas demokrasi yang telah disepakati dalam berbagai bagian tercermin dalam dinamika praktik. Demokrasi sebagai sebuah praktik tentu bukan sesuatu yang sempurna tetapi demokrasi memberi jaminan nilai-nilai luhur kemanusiaan di tataran politik emansipasi (*emancipatory politics*) dan juga politik pilihan hidup (*life politics*) (Giddens, 2008). Nilai-nilai luhur itulah yang perlu terus didorong dan dipelihara. Demokrasi tidak mungkin menolak pluralitas yang

merupakan sebuah kodrat kemanusiaan. Dalam demokrasi pluralitas dihormati sebagai sebuah kekayaan. Kedua corak politik ini harus diberi ruang hidup dalam demokrasi.

Pemilu 2024 kembali menjadi batu uji bagi habituasi praktik demokrasi di Indonesia dalam kurun lima tahun. Habituasi Demokrasi Pancasila dalam pemilu berarti juga ajang dimana nilai-nilai luhur kemanusiaan ini dijujung tinggi dan dipraktikkan. Pemilu sebagai praktik Demokrasi Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun bagi politik demagogi. Politik demagogi sebagaimana disebutkan di atas mendasari diri pada kemarahan dan kebencian merupakan model dan tindakan yang menyimpang dari semangat demokrasi itu sendiri. Kebencian dan kemarahan terhadap keberagaman misalnya secara kodrati tak searas dengan sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" karena keberagaman itu sendiri merupakan suatu yang kodrati dan berdimensi ilahi. Sehingga sikap menolak keberagaman merupakan sebuah penyangkalan terhadap sila pertama Pancasila dan berarti juga tak senafas dengan sila-sila Pancasila lainnya.

Pemilu 2024 menjadi momentum pembiasaan (habituasi) demokrasi dan menjadi ajang pendidikan untuk menghormati keberagaman cara pandang, pilihan politik, dan cara bertindak. Pemilu 2024 juga menjadi momentum kritis membangun budaya politik yang kokoh untuk kehidupan bangsa yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Asshididiqie, J.(2006). *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen Kepaniteraan MK
- Bourdieu, P.(1990). *Logic of Practice*. Cambridge: Polity Press
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. West Sussex:Wiley-Blackwell
- Dhakidae, D.(2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia
- Dick, van, J.A.G.M & Hacker, K.L. (2018), *Internet and Democracy in the Network Society*. New York & London: Routledge Taylor and Francis Group
- Giddens, A.(1986). *The Constitution of Society-Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press
- .(1991). *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press
- .(1991). *Modernity and Self-Identity*. Cambridge: Polity press
- .(2000). *The Third Way-Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia
- Hardiman, F.B. (2021). *Aku Klik maka Aku Ada*. Yogyakarta: Kanisius
- .(2021). *Demokrasi dan Sentimentalitas*. Yogyakarta: Kanisius
- .(2010, editor). *Ruang Publik Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta:Kanisius
- Haryatmoko.(2003). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas
- Harari, Y.N.,(2011). *Sapiens-Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu Hingga Perkiraan Kepunahannya*. Tangerang: Alvabet
- Herry-Priyono, B.(2002). *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: KPG

Priyono, AE & Hamid, U. (2014, ed.), *Merancang Arah Baru Demokrasi-Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: KPG

Rascão, J.(2023), *Debate on the Democracy of the Future, in the Digital Era (from Theori to Practice)*. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, Vol. 07, Issues 03, PP 06-54. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2023/03/B227030654.pdf>

Sindhunata. (2007). *Kambing Hitam Teori René Girard*. Jakarta: Gramedia

Suseno, F.M. (1995). *Mencari Sosok Demokrasi-Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia